

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,
DEWAN KOMISARIS, DAN LEVERAGE TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

TAUFIK AJI WICAKSONO

B200 140 300

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DEWAN
KOMISARIS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2014-2016)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

TAUFIK AJI WICAKSONO

B 200 140 300

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Dra. Mujiyati, M.Si)
NIDN. 0624096401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DEWAN
KOMISARIS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek**

Indonesia Periode 2014-2016)

OLEH

TAUFIK AJI WICAKSONO
B 200 140 300

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 09 Mei 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Dra. Mujiyati, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Dra. Nursiam, Akt, M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Fauzan S.E., M.Si**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan,



(Dr. Syamsudin, M.M)
NIDN. 0017025701
PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan memperanggungkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Mei 2019

Penulis



TAUFIK AJI WICAKSONO
B200140300

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DEWAN
KOMISARIS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**
(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2014-2016)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil secara purposive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014-2016. Berdasarkan kriteria tersebut maka terdapat 28 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian. Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, dewan komisaris dan leverage mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris, *leverage*, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Abstract

This research is aimed to examine the influence of financial performance to the disclosure corporate social responsibility. The population is manufacturing companies in consumer goods industry sector which are listed in Indonesia Stock Exchange have been selected by using purposive sampling, the sample taken based on certain criteria. The data in this research is the financial statements in 2014-2016 periods. 28 companies have been selected as samples. Analysis using classical assumption test and then tested hypothesis using multiple linear regression method with coefficient of determination test, F test, and t test use the SPSS application. The results showed that the variables firm size, board of director, and leverage affect the Disclosure Corporate Social Responsibility. Profitability has no effect to the Disclosure Corporate Social Responsibility.

Keywords: firm size, profitability, board of director, leverage and the disclosure corporate social responsibility

1. PENDAHULUAN

Pada kenyataan seluruh perusahaan berbagai sektor di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba (profit) yang sebesar-besarnya. Namun demikian banyak perusahaan yang lupa atau lalai untuk memperhatikan dampak yang timbul dari suatu aktivitas operasional perusahaan.

Dimana dampak tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh pihak internal perusahaan, melainkan juga dirasakan oleh pihak eksternal perusahaan.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan di Indonesia termasuk pengungkapan wajib (mandatory disclosure) karena telah ada regulasi yang mewajibkannya, salah satunya yaitu peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) nomor X.K.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan Laporan Keuangan (LK) nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Akan tetapi peraturan tersebut hanya membagi aspek CSR ke dalam empat aspek besar, yaitu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Luas pengungkapan CSR dalam regulasi Bapepam tersebut hanya merupakan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Walaupun legitimasi publik memaksa untuk melakukan pengungkapan secara rinci, tiap entitas bisnis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Istilah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility = CSR) muncul sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sosial. Bowen (2013: 6) mendefinisikan CSR sebagai suatu kewajiban, untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada untuk membuat keputusan, atau untuk mengikuti tindakan yang diinginkan dalam arti objektif dan nilai yang ada di masyarakat (Moon dan Vogel, 2008:304). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Namun diharapkan kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan perusahaan. Ada tiga tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan secara bersama-sama dan seimbang terhadap para pemangku kepentingan, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab atas hukum atau peraturan, dan tanggung jawab sosial (Hadi, 2014). Eklington (1997) menggunakan istilah “triple bottom-line, profit, people, planet” untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab lingkungan dan sosial karena lingkungan dan masyarakat juga merupakan bagian dari para pemangku kepentingan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak kegiatan operasional perusahaan yang timbul secara tidak langsung mengubah sudut pandang perusahaan. Sudut pandang disini berarti mengeluarkan biaya untuk Corporate Social Responsibility tidak lagi dipandang sebagai biaya yang menurunkan laba, namun sebagai investasi untuk dapat

meningkatkan citra baik di mata masyarakat, sehingga dapat meningkatkan laba jangka panjang serta mempertahankan legitimasi dan going concern perusahaan. Hal ini didukung oleh teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil tindakan yang dapat diterima secara sosial oleh masyarakat agar perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya (O'Donovan, 2002). Untuk memperoleh legitimasi, pemegang kepentingan harus mengetahui realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan melalui pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Manajemen harus mempunyai suatu konsep atau program yang dimana perusahaan tetap bisa mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan suatu perusahaan dengan tidak merugikan pihak eksternal perusahaan seperti masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Dalam konsep Corporate Social Responsibility sendiri merupakan suatu konsep yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders, serta dapat mencapai laba yang maksimum sehingga mampu meningkatkan harga saham (Kiroyan, 2006). Semakin banyak bentuk tanggung jawab sosial yang diterapkan perusahaan, maka akan semakin baik pula citra perusahaan di mata para stakeholder. Citra positif yang diperoleh perusahaan tersebut akan menarik minat para investor untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan tersebut.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan pengaruhnya terhadap Corporate Social Responsibility. Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan yang lebih baik daripada perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hal ini disebabkan semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar pula sumberdaya yang dimiliki perusahaan, begitu sebaliknya semakin kecil suatu ukuran perusahaan, maka semakin kecil pula sumberdaya yang dimiliki perusahaan tersebut. Akibat dari besarnya sumberdaya tersebut perusahaan akan semakin banyak berhubungan dengan stakeholder, sehingga perusahaan dalam melakukan corporate social responsibility juga lebih luas. Ukuran perusahaan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin dikenal pula perusahaan tersebut dikalangan masyarakat dan perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih

dari masyarakat, sehingga perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi CSR adalah Leverage, yaitu tingkat hutang yang dibiayai oleh ekuitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka akan semakin kecil tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, karena untuk menghindari perhatian dari debtholder (pemegang hutang). Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kemampuan yang rendah dalam menjalankan kegiatan sosialnya dan berakibat rendahnya pengungkapan perusahaan karena perusahaan berupaya tidak melanggar kontrak utang dengan mengurangi aktivitas pengurang laba. Faktor lain yang dapat mempengaruhi corporate social responsibility adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pengawas bagi manajemen dalam perusahaan, jadi semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin besar tekanan terhadap manajemen, semakin kecil jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka semakin sedikit tekanan terhadap manajemen yang akan mengakibatkan semakin sedikit pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Penelitian tentang CSR telah dilakukan sebelumnya antara lain Santioso dan Chandra (2012) menyatakan profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang terperinci, salah satunya yaitu pengungkapan CSR, sehingga profitabilitas berpengaruh terhadap CSR. Sebab, mereka ingin meyakinkan investor terhadap perusahaan agar para investor berinvestasi di perusahaan tersebut. Profitabilitas menunjukkan efektifitas manajemen dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan yang besar akan menuai banyak anggapan dari publik bahwa perusahaan hanya memperkaya para pemegang saham saja tanpa memperhatikan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan pengungkapan lebih banyak tentang aktivitas sosial maka akan menepis anggapan tersebut dan akan meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat dan para investor. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Ekowati dkk (2014) dan Rohman (2015) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap CSR, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriayu dan Mimba (2013) dan Trisnawati (2014) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989) menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi memiliki kemampuan yang rendah dalam menjalankan kegiatan sosialnya dan berakibat rendahnya pengungkapan karena perusahaan berupaya tidak melanggar kontrak utang dengan mengurangi aktivitas

pengurang laba. Sejalan dengan bukti empiris Effendi dkk (2012), tetapi berbeda dengan hasil penelitian Anggraeni (2006) yang menemukan hubungan antara tingkat leverage perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan, yang menyatakan bahwa tingkat leverage mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan.

Penelitian tentang pengungkapan CSR dilakukan oleh Belkaoui dan Karpik (1989), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Apriweni (2009), Cahya (2010) dan Anggraeni (2006) yang berhasil membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hal ini berarti bahwa perusahaan besar yang dinilai dengan tingkat aktiva yang besar akan mengungkapkan lebih banyak tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”.

2. METODE

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 28 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan Kriteria yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan, menerbitkan laporan keuangan audit secara berturut-turut, memiliki laba positif berturut-turut selama periode 2014-2016 serta perusahaan tersebut menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan memiliki data mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan dewan komisaris. (www.idx.co.id).

Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi berganda (Multiple Linear Regression Method). Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$KKDt = \alpha + \beta_1 DAUt + \beta_2 DAKt + \beta_3 DBHt + \beta_4 BMt + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

KKD	= Kemandirian keuangan daerah
α	= Konstanta
β	= Koefisien jalur
t	= Tahun penelitian
DAU	= Dana alokasi umum
DAK	= Dana alokasi khusus
DBH	= Dana bagi hasil
BM	= Belanja modal
ε	= Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji asumsi klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi normal, tidak mengandung autokorelasi, multikoloniaritas, dan heteroskedastisitas.

3.2 Uji normalitas

Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *one sample Kolmogorov Smirnov test* adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,258	> 0,05	Distribusi data normal

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa distribusi data normal.

3.3 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Ketentuan	Kesimpulan
2,017	$DU < DW < 4-DU$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,017 dimana nilai DU sebesar 1,7575, sedangkan untuk nilai 4-DU memiliki nilai sebesar 2,2425. Nilai tersebut berada pada ketentuan $DU < DW < 4-DU$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

3.4 Uji multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Dana alokasi umum	0,618	1,619	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana alokasi khusus	0,582	1,720	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana bagi hasil	0,795	1,258	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	0,433	2,308	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.5 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan Uji Glejser. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan nilai residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
Pendapatan asli daerah	0,239	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi umum	0,858	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi khusus	0,475	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja modal	0,471	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.6 Pembahasan hasil uji hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	thitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	25,671	18,331	0,000	
Dana alokasi umum	-1,269E-005	-6,992	0,000	H1 diterima
Dana alokasi khusus	4,303E-006	1,047	0,298	H2 ditolak
Dana bagi hasil	-1,786E-005	-1,478	0,143	H3 ditolak
Belanja modal	4,158E-006	1,133	0,260	H4 ditolak
R ²	0,387			
Adjusted R ²	0,362			
Fhitung	15,018			
Sig	0,000			

Sumber :Data sekunder diolah,2018

3.7 Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil pengujian variabel dana alokasi umum diperoleh thitung sebesar $-6,992 < t_{tabel}$ sebesar $-1,98525$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_2 diterima. Hal tersebut berarti dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh dana alokasi umum yang signifikan ini mengindikasikan bahwa daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah. Arah koefisien dana alokasi umum yang negatif berarti ketika dana alokasi umum meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan menurun, apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Dana alokasi umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil dana alokasi umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud.

3.9 Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil pengujian variabel dana alokasi khusus diperoleh t_{hitung} sebesar $1,047 < t_{tabel}$ sebesar $1,98525$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,298 >$ batas signifikansi sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus yang dibagikan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah relatif kecil dibandingkan dengan dana alokasi umum, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar dana alokasi khusus yang dialokasikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.10 Pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil pengujian variabel dana bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar $-1,478 >$ t_{tabel} sebesar $-1,98525$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,143 >$ batas signifikansi sebesar $0,05$, maka H_0 ditolak dan H_4 ditolak. Hal tersebut berarti dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Dana bagi hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dana bagi hasil yang dibagikan pada setiap Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah masih relatif kecil dibandingkan dana alokasi umum, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar dana bagi hasil yang dialokasikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.11 Pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil pengujian variabel belanja modal diperoleh t_{hitung} sebesar $1,133 < t_{tabel}$ sebesar $1,98525$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,260 > \text{batas signifikansi}$ sebesar $0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Hal tersebut berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar porsi anggaran belanja modal tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi ruang lingkup yang hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2014-2016 dan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal yang digunakan untuk menganalisis pengaruh-pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah sehingga hasil penelitian ini belum

dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, serta penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini menjadikan hasil penelitian ini tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari kemandirian keuangan daerah dan pada akhirnya tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu penelitian yang kredibel.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat serta bisa memberikan gambaran yang lebih rill tentang kemandirian keuangan daerah dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dan untuk menggunakan variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dari laporan realisasi APBD, tetapi juga melalui metode observasi atau pengamatan terhadap obyek secara langsung. Penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel kabupaten dan kota di luar Daerah Jawa Tengah, agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/ kota di luar Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albareda, L. 2008. Corporate responsibility, governance and accountability: from self-regulation to co-regulation. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 8(4), 430–439.
- Anggraini, Fr. R. R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Symposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Apriwenni, P. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Laporan Tahunan Perusahaan untuk Industri Manufaktur Tahun 2008*. IBII, Jakarta.
- Apriyanti, N. W., & Budiasih. 2016. Profitabilitas dan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan *High* dan *Low Profile*. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 14.2, 977-1004.

- Belkaoui, A. and P. G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol. 2. (1): 36-51.
- Bowen, Howard R. 2013. *Social Responsibilities of the Businessman*. Second Edition. Iowa City: University of Iowa Press.
- Budiman, Nita Andriyani. 2015. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Vol.1 No.1.
- Cahya, Bramantya Adi. 2010. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Cahyonowati, Nur. 2003. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (*Social Disclosure*) Dalam Laporan Tahunan Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Dewi, S. S., & Priyadi, M. P. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No.3.
- Dibiyanoro. 2011. Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Mandatory Disclosure Financial Statement pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* Vol. 1 No.2.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Santioso, Linda dan Natasha Caesar D. 2012. “Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”. *Jurnal Akuntansi*, Vol 12 No. 1, ISSN: 1411- 691X.
- Sari, Ayu Intan Permata. 2016. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. ISSN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol.5, No.6, 2460-0585.